



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUDIRO
2. Jabatan : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
3. NHK : 94163

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **7.605.000.000**

1. Tanah Seluas 3.570 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 705.000.000
2. Tanah Seluas 3.045 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.225.000.000
4. Tanah Seluas 1.710 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **483.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, TOYOTA ZENIX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **45.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **2.841.200.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 10.974.700.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.974.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.